KILAS
Delapan Perusahaan Pembiayaan Belum Penuhi Ekuitas Minimal

PERSPEKTIF
Sektor Produktif Topang Bisnis Pembiayaan

www.appi.id

APPI ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA

MULTIFINANCE

Agustus 2023

MENAKAR DAMPAK PAJAK NATURA UNTUK KORPORASI



Maju Berkat Pembiayaan

asuransi sinarmas

Fitch has affirmed 'AA+(idn)' with Stable Outlook

AAA stable outlook KRI 2019

PEFINDO "idAA+" PROSPEK STABIL

ISO 9001:2015 CERTIFIED | ISO 14001:2015 CERTIFIED | ISO 31000:2018 CERTIFIED | ISO 37001:2016 CERTIFIED | ISO 19600:2014 CERTIFIED | ISO 27001:2016 CERTIFIED



Asuransi Sinar Mas
Terdaftar Dan Diawasi Oleh:

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

KENAPA HARUS ASURANSI SINAR MAS ?

- Merupakan perusahaan asuransi umum yang menjadi market leader di industri asuransi di Indonesia selama 37 tahun.
- Dalam operasional perusahaan didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidangnya.
- Mempunyai 183 jaringan kantor cabang/pemasaran/ marketing point di seluruh Indonesia, terdiri 34 kantor cabang, 75 kantor pemasaran dan 74 kantor marketing point untuk mendukung layanan dan pengembangan bisnis perusahaan.
- Perusahaan terus berinovasi dengan berbagai produk dan layanan yang inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta perkembangan teknologi.
- Berkomitmen dalam kecepatan melakukan pembayaran klaim dan telah dibuktikan pada peristiwa penting nasional.
- Positioning perusahaan di industri asuransi mendapatkan pengakuan dari masyarakat melalui berbagai penghargaan yang diterima.

PENGHARGAAN

- 1st The Best Indonesia GCG Award VI 2021 category General Insurance Asset > Rp. 5 T dari Economic Review
- "The Market Leader in National General Insurance Industry 2021" dalam ajang 22nd Infobank Insurance Awards 2021.
  Spesial award ini melengkapi penghargaan/apresiasi lainnya yang diterima Asuransi Sinar Mas pada acara ini yaitu :
  * Predikat "Sangat Bagus" untuk kategori Perusahaan Asuransi Umum dengan premi bruto Rp 2,5 Triliun keatas.
  * Predikat "Sangat Bagus" ini telah didapatkan selama 7 tahun berturut-turut & tahun ini kembali mendapatkan Golden Throphy.
  * Ranking pertama di kategori Perusahaan Asuransi Umum dengan premi bruto Rp. 2,5 Triliun ke atas.
- PT Asuransi Sinar Mas - TOP CSR Awards 2021 # Star 4 dari Majalah Top Business
- Rumah Kreatif Sinar Mas - Top CSR Awards 2021 Kategori Khusus untuk Program Pelibatan & Pengembangan Masyarakat dari Majalah Top Business
- Howen Widjaja, Direktur Utama PT Asuransi Sinar Mas - TOP Leader on CSR Commitment 2021 dari Majalah Top Business

PT. ASURANSI SINAR MAS
Plaza Simas, Jl KH Fachrudin No 18, Jakarta Pusat 10250
24 Hour Customer Care (021) 2356 7888 / 5050 7888 | WhatsApp 02180600691 | www.sinarmas.co.id
ASURANSI SINAR MAS OFFICIAL | ASURANSISINARMASOFFICIAL | ASURANSI SINAR MAS | AS_SINARMAS

LSPPI
LSP PEMBIAYAAN INDONESIA

DAFTARKAN SEGERA

	UJIAN	DIKLAT	TANGGAL TUTUP PENDAFTARAN
Manajerial (Diklat Offline)	16 AGS 2023 20 SEPT 2023	14 - 15 AGS 2023 18 - 19 SEPT 2023	03 AGS 2023 07 SEPT 2023
Manajerial (Full Online)	24 AGS 2023 27 SEPT 2023	16 - 23 AGS 2023 20 - 26 SEPT 2023	07 AGS 2023 11 SEPT 2023

		ASESMEN	SEMINAR	TANGGAL TUTUP PENDAFTARAN
Direksi & Komisaris (Full Offline)	**IND** **ENG**	30 AGS 2023 27 SEPT 2023	29 AGS 2023 26 SEPT 2023	15 AGS 2023 15 SEPT 2023

Profesi Penagihan oleh Perusahaan Pembiayaan

Sejak **2017**, perusahaan pembiayaan sudah dapat mendaftarkan sendiri ujian **Sertifikasi Profesi Penagihan** setiap **Senin s/d Sabtu** pukul **08.00 - 19.00** (5 sesi pilihan).
TANPA LIMIT JUMLAH PESERTA (UNLIMITED)

#AyoSertifikasiOnline

INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI:

021-29820180
info@sppi.co.id

DAFTAR ISI

8 FOKUS

Menakar Dampak Pajak Natura untuk Korporasi

Pemerintah kembali mengeluarkan aturan pajak yang baru. Salah satu skema pajak yang mulai digulirkan yakni pengenaan pajak penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima oleh pekerja atau karyawan.



6 Sambutan
Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI
Berkontribusi untuk Negara

14 Kilas
- Delapan Perusahaan Pembiayaan Belum Penuhi Ekuitas Minimal
- Hino Finance Rilis Obligasi Rp700 Miliar
- Woori Finance Bagikan Dividen Rp10,38 Miliar
- Obligasi BRI Finance Kelebihan Permintaan
- Agusman & Hasan Fawzi Isi Pos DK OJK Periode 2023—2028
- Bijak Mengelola Limbah Baterai Listrik

23 Perspektif
- Sektor Produktif Topang Bisnis Pembiayaan
- Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga
- Marak Akuisisi Oleh Investor Asing Prospek Menjanjikan Industri Pembiayaan

33 Lensa
33 Seremoni
34 Daftar Anggota APPI

Dapatkan Souvenir menarik dari APPI bagi yang menuliskan artikel dalam majalah *Multifinance*.
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai informasi ini, dapat menghubungi Sekretariat APPI
di Telp. **(021) 2982 0190** atau email: **sekretariat@ifsa.or.id**

ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA

Pemimpin Umum:
Suwandi Wiratno

Penanggung Jawab:
Sigit Sembodo
Rosalina Dhanudimuljo
Gusti Wira Susanto
I Dewa Made Susila
Agus Prayitno Wirawan
Ristiawan Suherman
Harjanto Tjitohardjojo
Iwan Setiawan
Yap Tjay Hing
Tetsushi Tanaka
Primartono Gunawan
William Francis Indra

Pemimpin Redaksi:
Sri Haryati

Sekretaris Redaksi:
Wellyani
Daniel Darmadi

Sirkulasi/Distribusi:
Sekretariat APPI

ALAMAT REDAKSI:
Kota Kasablanka
(EightyEight@Kasablanka)
Tower A Lantai 7 Unit D
email: sekretariat@ifsa.or.id
website: www.appi.id
Telp: 021-2982 0190
Fax: 021-2982 0191

Surat Pembaca

Perhitungan Pajak Natura

Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan terkait dengan pajak kenikmatan atau pajak natura. Bagaimana sebenarnya implementasi pajak natura dan dampaknya bagi perusahaan pembiayaan ke depan?

Trisia Winanti
Bogor, Jawa Barat

Ulasan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023 yang mengatur perlakuan pajak atas penggantian atau imbalan yang diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan, dibahas secara khusus dalam Fokus edisi bulan ini.

Jasa Akuntan Publik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum lama ini menerbitkan aturan terkait dengan penggunaan jasa akuntan publik untuk memperkuat laporan keuangan industri jasa keuangan. Mohon majalah ini dapat mengulas perubahan regulasi tersebut dan dampaknya ke industri pembiayaan.

Yayan Rumangsa
Purwokerto, Jawa Tengah

Terima kasih atas masukannya. Kami mempertimbangkan untuk mengulas hal tersebut.

Suwandi Wiratno,
Ketua Umum
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Berkontribusi untuk Negara

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan sebuah negara yang dikembalikan kepada masyarakat salah satunya melalui kegiatan pembangunan.

Geliat proyek infrastruktur, misalnya, merupakan bentuk nyata dari belanja negara yang sebagian di antaranya bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, ada perputaran di sana. Dana yang dikutip dari pajak, digunakan untuk menumbuhkan aktivitas dan sumbu-sumbu ekonomi baru.

Belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan merilis Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

Regulasi itu merupakan turunan dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Secara mudahnya, pajak natura menyasar karyawan yang menerima fasilitas dari korporasi terkait dengan pekerjaan yang dijalankan. Hanya saja, dalam aturan itu tidak semua fasilitas menjadi objek pengenaan pajak.

Aturan ini harus kita pahami sebagai upaya negara untuk memperluas basis penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Tentu kami berharap regulasi terkait dengan pajak natura itu berdampak positif bagi perkembangan industri pembiayaan. Banyak korporasi di Indonesia yang melakukan kerja sama dengan perusahaan pembiayaan untuk memberikan fasilitas kepada karyawan untuk memudahkan kegiatan operasional perusahaan.

Harapannya, aturan tersebut tidak lantas menurunkan kebijakan korporasi ke depan terkait dengan berbagai fasilitas kepada karyawan untuk mendukung kegiatan usahanya.

Justru kami berharap akan lahir berbagai terobosan dalam meningkatkan kinerja korporasi, termasuk dampaknya untuk industri pembiayaan.

Kami berharap pemerintah tekun melakukan sosialisasi kepada pelaku dunia usaha terkait dengan regulasi pajak natura ini. Jangan sampai, muncul perbedaan perspektif antara pemerintah dan dunia usaha yang berujung tidak optimalnya regulasi tersebut.

Dunia usaha percaya bahwa kontribusi pajak sangat besar manfaatnya untuk mendukung pembangunan. Semua pihak harus saling mendukung guna peningkatan perekonomian ke depan. (*)



IdScore
PEFINDO Credit Bureau

PEFINDO
CREDIT BUREAU

IdIncome Estimation
UNTUK EFISIENSI DAN KEPUTUSAN LEBIH PASTI



data. insight. moves you forward

Penghasilan adalah salah satu parameter penting dalam analisa kredit. Prediksi penghasilan (*proxy income*) berbasis data kredit historis membantu memberikan gambaran obyektif mengenai kapasitas calon debitur guna meningkatkan akurasi analisa kredit.

Manfaatkan **IdIncome Estimation** untuk meningkatkan akurasi analisa kredit dan pastikan kualitas portofolio kredit terjaga untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

Mengapa IdIncome Estimation

BERBASIS DATA KREDIT HISTORIS

KEMUDAHAN AKSES

DISEDIAKAN OLEH IdScore, BIRO KREDIT TERKEMUKA DAN TERPERCAYA

PEFINDO Biro Kredit - IdScore
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
T: (62-21) 5154501 | F: (62-21) 5154503

www.IdScore.id
IdScore Indonesia
IdScore
IdScore
idscore.id
IdScore_Ind

Terdaftar dan diawasi oleh OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

Menakar Dampak Pajak Natura untuk Korporasi

Pemerintah kembali mengeluarkan aturan pajak yang baru. Salah satu skema pajak yang mulai digulirkan yakni pengenaan pajak penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima oleh pekerja atau karyawan.



Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66 tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan disebutkan bahwa biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

PMK tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Peraturan Pemerintah No. 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

PMK No. 66/2023 menjadi aturan teknis yang ditunggu karena menyajikan instrumen pengecualian dan mulai berlaku pada 1 Juli 2023.

Menurut Tax Partner, PSS Consult, Ernst & Young Indonesia Iman Santoso mengatakan bahwa PMK tersebut sudah ditunggu oleh wajib pajak untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan menghindari upaya penggerusan basis pajak bagi wajib pajak dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan.

Menurutnya, pajak atas natura merupakan suatu pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas tunjangan di luar upah atau gaji normal atau segala bentuk kompensasi yang bersifat non tunai.

"Pajak atas natura dapat diartikan sebagai suatu pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh penerima penghasilan atas fasilitas-fasilitas berupa kenikmatan maupun natura, yaitu seperti *membership* golf, akomodasi kendaraan, *voucher* telepon, dan lain-lain yang diterima secara non tunai," katanya.

Dia menuturkan, secara hakekat sesuai dengan PMK No. 66/2023, ketentuan ini akan menargetkan seluruh kelompok wajib pajak yang menerima penghasilan yang bersifat non tunai.

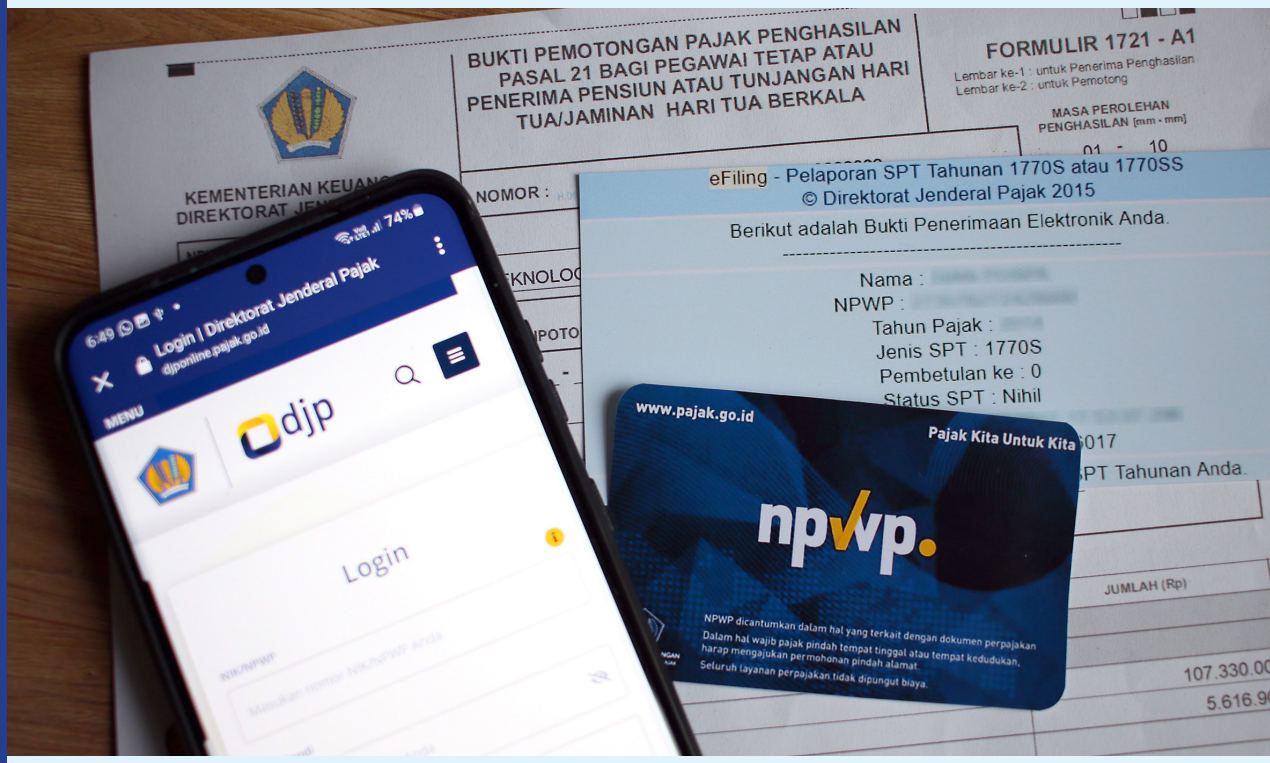
Akan tetapi, aturan itu juga mengatur mengenai pengecualian natura dan/atau kenikmatan dari objek pajak penghasilan.

Pajak atas natura dapat diartikan sebagai suatu pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh penerima penghasilan atas fasilitas-fasilitas berupa kenikmatan maupun natura, yaitu seperti *membership golf*, akomodasi kendaraan, *voucher* telepon, dan lain-lain yang diterima secara non tunai.

—Iman Santoso,
Tax Partner, PSS Consult, Ernst & Young Indonesia

Dalam Pasal 4 PMK No. 66/2023, beberapa yang masuk dalam pengecualian yakni makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai; natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, seperti daerah yang telah mendapatkan penetapan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai Daerah Terpencil.

Selain itu, natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa; atau natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.



"Terdapat ketentuan mengenai *safe harbor* bagi wajib pajak dalam memberlakukan PMK ini. Serta, perlu digarisbawahi, tidak semua jenis natura dan/atau kenikmatan akan dikenakan pajak penghasilan," kata Iman.

Terkait dampaknya bagi korporasi maupun karyawan, Iman menuturkan sebagai kebijakan anyar tentu sangat wajar apabila muncul opini positif maupun negatif dikarenakan berbagai jenis industri termasuk perusahaan pembiayaan perlu mengkaji lebih lanjut dampak peraturan tersebut terhadap analisa risiko keuangan (*risk management*) dan perencanaan pajak (*tax planning*) yang sudah ada (*existing*) saat ini dengan yang akan terjadi sesudah peraturan tersebut diterbitkan.

Iman menyatakan perlu kajian mendalam terkait dengan kebijakan pajak natura itu karena akan mengubah kebijakan perusahaan pembiayaan.

Contohnya, barangkali selama ini perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas skema pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan *borrowing rate* yang lebih rendah dibandingkan nilai pasaran bagi karyawannya.

"Jika sebelumnya biaya tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan tetapi dengan terbitnya PMK 66/2023 ini, biaya dalam bentuk natura/kenikmatan tersebut diperbolehkan sebagai *deductible expense* karena berhubungan dengan biaya 3M [mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan], tetapi akan mempengaruhi kebijakan PPh Pasal 21 atas karyawannya karena dengan pemberian *borrowing rate* tadi akan menjadi obyek pemotongan PPh Pasal 21 kepada karyawan yang bersangkutan," jelasnya.

Selain itu, penting untuk diadakan sosialisasi mengenai perubahan kebijakan natura bagi pegawai perusahaan pembiayaan dengan diterbitkannya PMK No. 66/2023 tersebut. Sosialisasi bertujuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pemberi kerja dengan karyawannya.

Menurutnya, pemberlakukan PMK No. 66/2023, berpotensi meningkatkan *administrative cost* baru bagi korporasi. Ketentuan ini akan menambah tanggung jawab korporasi untuk dapat

memotong, menyetor, dan melaporkan objek pajak berupa natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh pegawainya di dalam perhitungan dan pelaporan SPT PPh 21 bulanan dan tahunan.

Demikian halnya bagi karyawan, apabila pegawai atau karyawan merasa terdapat penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan yang belum dipotong oleh pihak korporasi pemberi kerja, berdasarkan prinsip *self-assessment* yang dianut Indonesia, karyawan tersebut harus melaporkannya sendiri dalam SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

"Hal ini tentu berpotensi juga membebani karyawan," kata Iman.

Satu sisi, hadirnya ketentuan itu pula memberi kepastian hukum dan merupakan suatu bentuk penegasan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada korporasi terkait dengan tata cara pemberian pengecualian dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Adanya batasan tertentu dan jenis dan/atau batasan tertentu dari natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh dan adanya tata cara penilaian dan penghitungan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Sebelum PMK No. 66/2023 diterbitkan, katanya ketiga poin di atas merupakan sebuah tanda tanya bagi wajib pajak tentang bagaimana tata cara dan perlakuan atas penggantian/imbalan terkait dengan jasa yang di peroleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

"Maka dari itu, dengan diterbitkannya PMK 66 besar harapan bagi wajib pajak [korporasi] jika peraturan tersebut dapat menjadi suatu acuan untuk menghitung besarnya biaya pengurang [*deductible expenses*] yang diperbolehkan untuk kepentingan perhitungan penghasilan kena pajak tahunan sepanjang biaya-biaya tersebut tetap berhubungan dengan kegiatan usaha dan esensi biaya menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan," ujar Iman.



Dari perspektif kewajiban pemotongan pajak (*withholding income tax compliance*), korporasi harus mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pemotongan pajak ini agar terhindar dari penerapan sanksi perpajakan atas tindak ketidakpatuhan, sehingga korporasi harus mengantisipasi *compliance costs* yang lebih tinggi karena potensi risiko belum atau tidak sepenuhnya melakukan kewajiban pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan.

Dengan dijadikannya imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan di sisi pegawai, maka hal ini berpotensi dalam menaikkan rentang penghasilan yang akan diterima oleh pegawai menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, sehingga terdapat kemungkinan bahwa jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh pegawai menjadi bertambah.

Hanya saja, hal ini mungkin saja dapat diantisipasi jika korporasi dapat memberikan kebijakan berupa pajak penghasilan ditanggung oleh korporasi ataupun pajak penghasilan ditunjang (*grossed-up*) oleh korporasi, sehingga pemberlakuan ketentuan dalam PMK tersebut tidak mengurangi *take home pay* yang akan diterima oleh pegawai.

Di lain pihak, penerapan pajak atas natura/kenikmatan yang dalam kondisi tertentu dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto bagi korporasi pemberi kerjanya, dapat juga menurunkan pembayaran pajak penghasilan badan bagi korporasi pemberi kerja.

Oleh karenanya korporasi perlu melakukan simulasi perhitungan *overall* pajak atas PPh badan yang tarifnya *fixed* di 22% (atau jumlah yang lebih kecil apabila memenuhi persyaratan tertentu) dan PPh Pasal 21 yang diterapkan atas penghasilan dalam bentuk natura/kenikmatan kepada karyawan.

Sehingga, agar tidak timbul dampak psikologis negatif bagi pegawai dengan diterbitkannya PMK No. 66/2023, pihak korporasi perlu mengadakan diskusi dua arah kepada pegawai bahwa dengan terbitnya PMK itu tidak akan memengaruhi nilai *take home pay* yang diterima oleh pegawai.

Secara umum, menurut Iman ketentuan terkait pajak natura ini memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, yang perlu dipahami adalah tujuan dari pemberlakuan pajak natura ini adalah untuk menutup praktik-praktik penghindaran pajak dari Wajib Pajak yang berpendapatan tinggi atau dikenal dengan istilah *High Net Worth Individuals* (HNWI).

HNWI pada umumnya kerap mendapatkan fasilitas-fasilitas baik berupa natura maupun kenikmatan (*benefits in kind*) yang memiliki nilai cukup tinggi yang sebelumnya atas penerimaan fasilitas/natura/kenikmatan tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan penerapan pajak natura memperhatikan nilai kepantasan.

"Sehingga, natura dan/atau kenikmatan dalam jenis dan batasan nilai tertentu dikecualikan dari objek PPh," katanya.

Dwi menjelaskan, ada beberapa indikator yang dijadikan landasan dalam menentukan batasan itu.

Antara lain, Indeks Harga Beli Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Survei Standar Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS), Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan, Sport Development Index Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta *benchmark* beberapa negara.

Pasca diterbitkannya aturan ini, perusahaan wajib melakukan pemotongan PPh atas kenikmatan per 1 Juli 2023. Adapun, pemberian natura pada 2022 dikecualikan, sedangkan pemberian natura periode Januari—Juni 2023 wajib dihitung dan dibayar serta dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) 2023.

Pemerintah pada tahun ini memang berada pada fase krusial, mengingat adanya kewajiban konsolidasi fiskal yang mengamanatkan defisit di bawah 3% terhadap PDB.

Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menambahkan penggalian potensi yang menyasar karyawan memiliki konsekuensi berat.

Menurutnya, pemerintah perlu meng-optimalisasi pajak progresif dengan menyasar wajib pajak nonkaryawan yang memiliki daya beli lebih kuat. (*)

UU Perlindungan Data Pribadi telah disahkan!

Apakah data pribadi di perusahaan Anda sudah dikelola dengan baik sesuai UU PDP?

PT. Indocyber Global Teknologi
sebagai local partner dari

Informatica
CLOUD NOW. DATA ALWAYS.

Bisa Membantu Perusahaan Anda dengan
Solusi *Data Governance*

6 langkah untuk mengoperasionalkan
Data Privacy Governance

1 **Mendefinisikan dan Mengelola** Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

2 **Menemukan, mengklasifikasi, dan memahami** Data Pribadi dan Data Sensitif

3 **Memetakan Identitas** Pribadi dan Data Sensitif

ROI PRIVASI
'Bisnis dapat melihat pengembalian nilai sampai 2,7x untuk pembelanjaan mereka pada perlindungan aset'
- Cisco

4 **Mengotomatisasikan Analisis** Risiko Data dan terus memperbarui rencana perlindungan

5 **Lindungi Data dan Kelola** Hak Subjek dan Permintaan Penghapusan Data

ROI PRIVASI
'Konsumen 5x lebih mudah memberikan izin terhadap data pribadi kepada perusahaan yang mereka percaya'
- Boston Consulting Group

6 **Mengukur dan Mengkomunikasikan** Kesiapan Audit

iglo
an Indocyber company

Informatica
CLOUD NOW. DATA ALWAYS.

More Info

+62 21 566 3704 or **info@indocyber.co.id**

indocyber.id | Indocyber Global Teknologi | indocyber.co.id

Delapan Perusahaan Pembiayaan Belum Penuhi Ekuitas Minimal

JAKARTA — Sebanyak delapan perusahaan pembiayaan belum memenuhi ketentuan ekuitas minimal Rp100 miliar. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan dengan posisi Maret 2023 yang tercatat 11 perusahaan.

"Terkait ketentuan ekuitas minimum untuk perusahaan pembiayaan sesuai dengan POJK 35 Tahun 2018, masih terdapat delapan perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan dimaksud," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Juni 2023.

Ogi menyebut bahwa OJK telah melakukan *supervisory action* dengan melakukan *monitoring* atas realisasi aksi korporasi perusahaan sesuai *action plan* pemenuhan ekuitas yang telah disetujui OJK.

"Dan melakukan *enforcement* terhadap perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sampai dengan *timeline* yang telah disepakati," katanya.

Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa penyesuaian rencana bisnis perusahaan pembiayaan saat pandemi menerjang menyebabkan perusahaan sulit memenuhi ekuitas minimal Rp100 miliar.

Pandemi yang menyebabkan banyak perusahaan menderita kerugian disinyalir menjadi penyebab sebagian perusahaan pembiayaan tak kunjung memenuhi ketentuan modal. Namun, lebih dari itu, menurutnya, setiap pemain bisnis pembiayaan memiliki hambatan dan tantangan masing-masing.

"Mungkin pernah melampaui, tapi karena rugi, jadi turun. Mungkin pemegang sahamnya mengalami kesulitan menyetor modal dan harus cari investor," kata Suwandi. (*)





Hino Finance Rilis Obligasi Rp700 Miliar

JAKARTA — PT Hino Finance Indonesia merilis obligasi II Hino Finance Indonesia pada tahun ini dengan nilai pokok yang diterbitkan Rp700 miliar.

Dalam pengumumannya, obligasi tersebut ditawarkan dengan tingkat bunga tetap dan terbagi dalam dua seri. Perinciannya, untuk Seri A bunga obligasi ditawarkan sebesar 5,85%. Surat utang ini bertenor relatif pendek yakni 370 hari kalender sejak emisi.

"Jumlah pokok obligasi seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp366 miliar. Pembayaran pokok obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo," tulis perusahaan dalam pengumumannya.

Selanjutnya, untuk Seri B, bunga obligasi yang ditawarkan sebesar 6,75% dan memiliki tenor 3 tahun. Pokok obligasi seri ini adalah Rp334 miliar.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi," tulis manajemen.

Obligasi dari Hino Finance ini memperoleh peringkat dari Fitch Ratings Indonesia AAA (Idn). Penjamin pelaksana emisi obligasi dalam aksi korporasi ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia. Bertindak sebagai wali amanat PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. (BBRI).

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pendanaan lewat penerbitan obligasi saat ini lebih menjanjikan.

Bhima menambahkan penerbitan surat utang lebih rasional meskipun tantangan ke depan bunganya bisa lebih tinggi. Hal tersebut dilihat dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggunakan uang dari sumber pinjaman hingga risiko penyerapan pembiayaan.

Menurut Bhima, daripada menerbitkan saham yang harganya belum tentu menarik lebih baik menerbitkan surat utang. Terlebih saat ini perbankan likuiditasnya sedang gemuk. Menurutnya tren penerbitan obligasi juga meningkat lantaran bank perlu membuang kelebihan pendanaan dengan penawaran bunga yang cukup menarik. (*)

Woori Finance Bagikan Dividen Rp10,38 Miliar

JAKARTA — Rapat umum pemegang saham tahunan PT Woori Finance Indonesia Tbk menyepakati pembagian dividen sebesar 20% dari laba bersih yang dicatat pada tahun buku 2022. Dividen yang dibagikan tersebut setara dengan Rp10,38 miliar.

"Setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,88 per saham dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku," demikian dikutip dari hasil RUPST Woori Finance yang disampaikan kepada otoritas bursa.

Adapun, sisa laba akan digunakan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja perseroan.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham juga sepakat untuk merombak susunan pengurus perseroan. RUPST menerima pengunduran diri Cheol Hee Han selaku Komisaris Utama Woori Finance. Lalu, membatalkan pengangkatan Jeong Dae Kim sebagai direktur utama dan memutuskan tetap menjadi direktur.

Sebagai gantinya, Heon Joo Rhee diangkat sebagai direktur utama terhitung sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan FPT [*fit and proper test*] direktur utama, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan." (*)



ISO 27001

IMS
Innovation Comprehensive Technology

TRANSFORM YOUR FUNDING PROCESS INTO DIGITALIZATION

- Simply Funding & Hedging Process
- Easy to Integrate (Open API)
- Dynamic Setup External Bank Reports
- Dynamic Setup Journals
- Automatic Accrued Expense & PSAK
- Inquiries & Dashboards

FACILITY TYPE

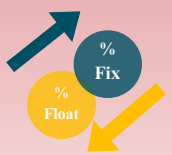
- Revolving
- Non - Revolving

FUNDING PRODUCT

- Joint Financing
  - -Mirroring
  - -Non Mirroring
- Channeling
- Executing
- MTN/Band
- Bank Account Loan (Daily Interest)
- Syndicate
- Money Market

HEDGING FEATURES

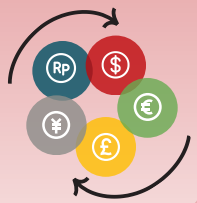
1. Interest Rate Swap



2. Call Spread Option



3. Cross Currency Swap



Multifinance Core System Solutions

iFinancing Business Application is an End to End Solutions for Multifinance Industry.
Consist of Finance Lease, Consumer Finance, Factoring and Operating Lease (Modal Kerja, Investasi, Multiguna).
iFinancing Built Based on Built to Complaint With Indonesia Goverment Regulations (SLIK, SILARAS, PSAK 71).

IMS
Contact Us

PT. INOVASI MITRA SEJATI | The Smith @Alam Sutera 5th Fl. Suite 01-17. Tangerang City, Banten 15315 | 021 3973 0397

Obligasi BRI Finance Kelebihan Permintaan

JAKARTA — Emiten pembiayaan PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) mengumumkan Obligasi II BRI Finance Tahun 2023 mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) hingga 342%.

Direktur Operasional BRI Finance Willy Halim Sugiardi mengatakan bahwa kelebihan permintaan terhadap obligasi yang dirilis menunjukkan tingginya minat pasar dan kepercayaan investor terhadap BRI Finance serta optimisme pasar pembiayaan seiring ekonomi Indonesia yang kian pulih.

Willy mengungkapkan bahwa ada tiga besar investor yang meminati Obligasi II BRI Finance Tahun 2023, di antaranya sektor perbankan, asuransi, dan aset manajemen.

"Kondisi *oversubscribed* ini boleh dibilang mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang semakin tinggi atas prospek bisnis pembiayaan di Indonesia seiring dengan semakin pulihnya perekonomian Indonesia, termasuk tren penjualan otomotif yang cenderung meningkat," kata Willy dalam keterangan tertulis.

Sebelumnya, BRI Finance menggelar penawaran umum Obligasi II BRI Finance Tahun 2023 pada 4 Juli—6 Juli 2023 dengan target penghimpunan dana sebanyak-banyaknya Rp500 miliar. Dalam aksinya, BRI Finance menerbitkan obligasi dalam dua Seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp197 miliar dan tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun.

Sementara, untuk Seri B dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp303 miliar, dan tenor tiga tahun sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,4% per tahun. Perlu diketahui, anak usaha bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) itu melakukan penawaran awal obligasi dimulai pada 14–21 Juni 2023 dengan rencana dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Juli 2023. (*)





Agusman & Hasan Fawzi Isi Pos DK OJK Periode 2023—2028

JAKARTA — Komisi XI DPR memutuskan untuk memilih Agusman dan Hasan Fawzi sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2023—2028. Pemilihan komisioner OJK itu mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Agusman dtetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan. Sedangkan, Hasan Fawzi menempati pos Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Keputusan pemilihan Dewan Komisioner OJK baru itu telah diambil melalui rapat internal secara musyawarah yang dilakukan secara tertutup, setelah keempat calon anggota merampungkan presentasi visi dan misi dalam 5 tahun ke depan.



"Agusman dan Hasan Fawzi [terpilih menjadi DK OJK], masing-masing menyampaikan pandangannya itu yang terbaik. Kita memilih sesuai musyawarah mufakat, tidak ada *voting*," kata Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo menuturkan keputusan tersebut dilihat dari sejumlah pertimbangan, yakni mulai dari segi tata kelola, risiko, dan kepatuhan (*governance, risk, and compliance* atau GRC), serta *market conduct*.

Andreas menuturkan bahwa DPR menginginkan adanya keseimbangan antara

pro industri dan pro konsumen. Hal itu, menurut Andreas, terlihat dari gagasan dan persentase dari Agusman dan Hasan Fawzi.

"Dan menurut kami itu semuanya menjawab apa yang menjadi tujuan dibentuknya DK sesuai UU PPSK yaitu meningkatkan daya saing global sekaligus kontributif untuk pertumbuhan ekonomi. Ini sesuai apa yang diinginkan dalam UU PPSK," kata Andreas.

Lebih lanjut, Andreas berharap agar paparan presentasi yang disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Tak tanggung-tanggung, Andreas menyatakan DPR akan menagih rencana tersebut.

"Itu akan kita tagih. Secara spesifik saya tekankan bagaimana supaya *market conduct* tidak membuat suatu perlakuan khusus terhadap asosiasi. Jangan sampai peran dari regulator itu diambil alih oleh asosiasi karena kita ingin menumbuhkan industri yang berdaya saing secara global tetapi juga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Andreas.

Saat proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menuturkan DK OJK harus mampu menyelesaikan berbagai masalah di sektor jasa keuangan, terutama di industri *financial technology* (*fintech*) yang tengah mengalami permasalahan.

Dia menuturkan, data Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, jumlah aduan terhadap sektor tekfin sudah mencapai 302 aduan dari masyarakat sampai dengan Oktober 2022.

"Masalah *fintech* ini perlu ditanggapi secara serius, sebab bagi kebanyakan orang mungkin masalah bunga yang tinggi menjadi masalah utama yang banyak dikeluhkan terutama pada pelaku usaha UMKM [usaha mikro kecil dan menengah]," katanya.

Dia menjelaskan perkembangan industri tekfin perlu diimbangi dengan ketegasan agar masyarakat tidak dirugikan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyatakan kinerja industri pembiayaan sudah cukup solid dari sisi pertumbuhan.

> **Masalah fintech ini perlu ditanggapi secara serius, sebab bagi kebanyakan orang mungkin masalah bunga yang tinggi menjadi masalah utama yang banyak dikeluhkan terutama pada pelaku usaha UMKM [usaha mikro kecil dan menengah].**
>
> — **Andreas Eddy Susetyo,** Anggota Komisi XI DPR

Begitu pula dengan indikator rasio kesehatan keuangan. Dia menyebut bahwa Agusman perlu meneruskan 'tongkat estafet' dengan menjaga dan meningkatkan kinerja industri pembiayaan yang telah dijalankan Ogi Prastomiyono yang sebelumnya mengisi posisi Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, yang kini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Di sisi lain, Suwandi menyebut bahwa saat ini regulator bersama dengan APPI tengah meramu peta jalan (*roadmap*) industri pembiayaan yang tengah dalam tahap diskusi.

"Tentunya nanti mudah-mudahan bisa finalisasinya secepat mungkin juga akan ditransfer oleh Pak Agusman," katanya. (*)

Bijak Mengelola Limbah Baterai Listrik



JAKARTA — Pengembangan kendaraan berbasis baterai listrik saat ini tengah menjadi isu menarik, termasuk di Tanah Air. Sebagai negara yang memiliki keunggulan sumber daya alam untuk teknologi baterai listrik, pemerintah berupaya menjadikan kendaraan listrik sebagai transportasi masa depan.

Saat ini, berbagai upaya menarik investasi untuk pengembangan teknologi baterai listrik terus dilakukan. Porsi penjualan kendaraan listrik, baik mobil dan sepeda motor tercatat terus meningkat.

Harus diakui teknologi baterai listrik untuk kendaraan bermotor sejalan dengan strategi global dalam menciptakan ekonomi berkelanjutan dan menekan penggunaan bahan bakar fosil.

Hanya saja, pemanfaatan baterai listrik bukan berarti tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari. Potensi limbah baterai listrik patut diwaspadai agar mampu menjaga kelestarian lingkungan.

Dikutip dari berbagai sumber, limbah baterai termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3). Baterai terdiri dari dua jenis utama yakni baterai primer yang hanya dapat digunakan sekali dan dibuang. Contohnya adalah baterai alkaline yang digunakan untuk senter maupun berbagai alat portabel lainnya.

Kedua adalah jenis baterai sekunder yang dapat digunakan dan diisi ulang beberapa kali. Contohnya adalah baterai timbal-asam pada kendaraan dan baterai ion litium pada elektronik portabel.

Baterai primer didalamnya terkandung unsur zinc, karbon, campuran mangan dioksida, serbuk karbon dan NH4Cl (Ammonium Klorida). Sedangkan baterai yang dapat diisi ulang mengandung cadmium, nikel, dan alkaline atau potassium hidroksida.

Apabila dibuang begitu saja, semua komponen penyusun baterai ini akan berdampak negatif bila mencemari lingkungan. Misalnya, kenaikan konsentrasi kadmium dalam tanah akan memperbesar penangkapan unsur logam tersebut oleh tanaman dan selanjutnya memasuki rantai makanan.

Dampak yang muncul apabila keracunan logam kadmium adalah tekanan darah tinggi, kerusakan ginjal, kehilangan sel darah merah, gangguan lambung serta kerapuhan tulang. Mangan dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan keracunan dan kerusakan saraf pada manusia.

Lalu, bila keracunan mangan maka akan terjadi halusinasi, pelupa serta keracunan saraf. Mangan juga dapat menyebabkan parkinson, emboli paru-paru dan bronkitis.

Dalam jangka panjang, kelebihan mangan dapat mengakibatkan impoten. Suatu sindrom lain yang disebabkan oleh mangan adalah memiliki gejala seperti skizofrenia, kebodohan, lemah otot, sakit kepala dan insomnia.

Adapun dalam baterai sekunder, seperti baterai Li-Ion yang kerap digunakan untuk ponsel, gawai, laptop, hingga kendaraan kecil maupun besar, di dalamnya terkandung unsur kimia lithium yang mudah bereaksi terhadap oksigen atau air, bahkan guncangan.

Selain itu ada unsur timah, asam sulfat, dan lainnya, yang akan membahayakan tubuh manusia. Jika terhirup akan menyebabkan penyakit seperti gangguan pernapasan, gangguan otak, bahkan impotensi, termasuk juga gangguan kehamilan dan janin pada perempuan. (*)

AdIns
Advance Innovations

IT Partner for Your Success

Special Offer
Rp **2.800***
Per Asset / Bulan

*T&C Apply



Akses Semua Dokumen Anda Kapan Saja, Dimana Saja

End-to-end Document Solution

Upload, Kelola, dan Ambil dokumen Anda secara mudah dengan **LiteDMS**

Available On Cloud

- Tidak Ada Lagi Dokumen Fisik
- Document Security
- Scalable Storage
- Open API
- Online Approval

Scan Here
For More Information about the Benefit of **liteDMS**

0859 5900 8500 | marketing@ad-ins.com | www.ad-ins.com

ad-ins.com | PT. Adicipta Inovasi Teknologi | Adins Official | PT. Adicipta Inovasi Teknologi | @adins.official



Sektor Produktif Topang Bisnis Pembiayaan

JAKARTA — Bisnis pembiayaan terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun ini. Nilai piutang pembiayaan yang berputar di masyarakat hingga Mei 2023 menyentuh Rp441,23 triliun atau tumbuh 16,38% *year-on-year*.

Jika diukur angka pertumbuhan sepanjang tahun ini, laju piutang pembiayaan itu setara dengan 6,1%.

Membaiknya indikator tersebut tak lepas dari kian membaiknya situasi perekonomian di dalam negeri. Daya beli masyarakat yang terjaga dan kebutuhan rumah tangga yang meningkat, turut mengerek permintaan pembiayaan.

Di satu sisi, permintaan kendaraan yang menjadi napas utama sejumlah perusahaan pembiayaan, menunjukkan peningkatan. Tahun lalu saja, penjualan kendaraan roda empat atau mobil menembus angka di atas 1 juta, melampaui angka penjualan 3 tahun terakhir saat pandemi Covid-19.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa pertumbuhan piutang pembiayaan didorong oleh penyaluran pembiayaan di sektor produktif baik pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

Adapun piutang pembiayaan investasi naik dari Rp126,90 triliun per Mei 2022 menjadi Rp149,17 triliun per Mei 2023 atau sebesar 17,55% *year-on-year* (YoY). Piutang pembiayaan modal kerja tumbuh sebesar 37,65% YoY dari Rp31,03 triliun per Mei 2022 menjadi Rp42,71 triliun per Mei 2023.

"Pertumbuhan piutang pembiayaan di sektor produktif ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya harga komoditas yang masih cukup tinggi yang menyebabkan adanya perkembangan positif di sektor pertambangan dan perkebunan, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di sektor infrastruktur," kata Ogi.

Pertumbuhan piutang pembiayaan di sektor produktif ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya harga komoditas yang masih cukup tinggi yang menyebabkan adanya perkembangan positif di sektor pertambangan dan perkebunan, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di sektor infrastruktur.

Selain itu, Ogi menyebutkan pertumbuhan piutang pembiayaan juga karena adanya ketentuan Peraturan OJK yang mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif minimal sebesar 10% dari total piutang pembiayaan pada akhir 2023.

Ogi menambahkan bahwa piutang pembiayaan multiguna di sektor konsumtif, khususnya pada pembiayaan otomotif dan pembiayaan alat berat, juga turut mengalami pertumbuhan sebesar 11,44% dari Rp204,52 triliun per Mei 2022 menjadi Rp227,92 triliun per Mei 2023.

Selain itu, piutang pembiayaan syariah juga mengalami peningkatan dari Rp16,23 triliun menjadi Rp20,94 triliun atau tumbuh sebesar 28,99%.

"Pertumbuhan piutang ini sebagai dampak positif setelah berakhirnya pandemi Covid-19 yang mendorong mobilitas masyarakat kembali normal dan kondisi perekonomian sudah kembali pulih," kata Ogi.

Kendati demikian, Ogi mengatakan bahwa pertumbuhan pada semester kedua 2023 tidak setinggi pada semester pertama. Pasalnya dengan berakhirnya status pandemi Covid-19, perusahaan pembiayaan harus waspada terhadap perubahan profil risiko nasabah yang pada saat pandemi layak dibiayai karena sebagian persentase pendapatan dapat ditabung.

Seperti halnya saat pandemi biaya transportasi bagi pekerja/profesional bisa disisihkan karena bekerja dari rumah.

Situasi tersebut, menurut Ogi, langsung atau tidak langsung mempengaruhi *delinquency rate* nasabah yang memiliki *fixed income* tersebut.

Dia juga mewanti-waktu soal *Non Performing Financing* (NPF) yang kemungkinan sedikit naik. Namun kendati demikian, menurutnya masih disimpulkan bahwa risiko pembiayaan masih cukup terkendali.

Sementara itu, lanjut Ogi, kondisi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang positif, dan tentu saja masih terdapat peluang pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mem*boosting* pembiayaan khususnya untuk area tertentu, misalnya Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Kalimantan yang persentase pertumbuhan pembiayaannya cukup tinggi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. (*)

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga

JAKARTA — Sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga stabil dengan permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai serta kinerja intermediasi yang kembali meningkat di tengah masih tingginya ketidakpastian pada perekonomian dan pasar keuangan global.

Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggambarkan bahwa rilis data perekonomian global menunjukkan divergensi perkembangan perekonomian negara-negara utama sehingga respons kebijakan yang diambil juga menunjukkan divergensi.

Di AS, The Fed menahan kenaikan suku bunga kebijakan seiring mulai meredanya tekanan inflasi. Namun, dengan masih ketatnya pasar tenaga kerja di tengah kinerja perekonomian yang di atas ekspektasi, The Fed memberi sinyal masih akan ada kenaikan suku bunga di tahun ini.

Kebijakan untuk menaikkan suku bunga juga ditempuh oleh bank sentral Eropa karena tingkat inflasi di beberapa negara Eropa yang persisten tinggi. Di Tiongkok, pemerintah dan bank sentral mengeluarkan stimulus dan menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus melemah.

Di domestik, kinerja perekonomian nasional terpantau positif dengan tekanan inflasi mereda dan kembali ke rentang target Bank Indonesia (Juni 3,52% *year-on-year*, turun dari Mei 2023 sebesar 4%). Selain itu, optimisme konsumen meningkat dan kinerja sektor riil juga terpantau positif.

Neraca perdagangan, di tengah penurunan pelemahan harga komoditas utama ekspor Indonesia, juga mencatatkan surplus di Mei 2023.

Kinerja perekonomian nasional dinilai relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain/ *peers* yang didukung oleh resiliensi sektor keuangan, sebagaimana rilis laporan *Article IV Consultation* oleh IMF. Kinerja positif perekonomian turut didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang solid.

Hasil *Global Bank Stress Test* IMF menunjukkan dalam skenario ekonomi memburuk, stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap dapat terjaga



baik dengan *buffer* permodalan dan likuiditas perbankan yang dimiliki diperkirakan mampu menyerap risiko yang muncul.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung, kinerja korporasi turut terangkat. Asesmen OJK sampai dengan kuartal pertama 2023 menunjukkan jumlah korporasi dalam tekanan, yang sempat meningkat selama pandemi dan bahkan meninggalkan *scarring effect* yang cukup dalam untuk beberapa sektor, terus menurun.

OJK mendukung transisi yang baik (*smooth*) dari era pandemi dengan melakukan normalisasi kebijakan secara bertahap (*targeted*) sehingga tidak menimbulkan guncangan (*cliff effect*). Kebijakan ini akan ditempuh secara terukur sehingga tidak menimbulkan *moral hazard*.

OJK juga telah meminta perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk terus membentuk pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang bersumber dari perekonomian global ke depan.

Langkah kebijakan penguatan sektor jasa keuangan di antaranya dilakukan dengan memperkuat integritas laporan keuangan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan meningkatkan peran manajemen dan akuntan publik melalui penyempurnaan POJK tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (RPOJK AP KAP).

Penyempurnaan ketentuan antara lain mencakup penyesuaian rotasi penggunaan jasa akuntan publik bagi bank umum dan emiten yang akan menggunakan kode etik standar internasional yang diterbitkan oleh IESBA, penguatan pertukaran data dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan dalam pengelolaan dan pengawasan akuntan publik serta memperkuat ruang lingkup audit untuk LJK dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

RPOJK juga mengatur peran kerja sama kantor akuntan publik dengan afiliasi asing yang diharapkan memperkuat pengendalian mutu dan kompetensi akuntan publik.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Nasabah dalam proses pendaftaran rekening di industri pasar modal dan pengkinian data, OJK akan melakukan pengaturan terkait Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (KYC *Administration*) yang memungkinkan data nasabah dikelola secara *centralize platform*.

Dengan demikian, proses pendaftaran, pengisian formulir, dan penyampaian dokumen yang berulang pada Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal yang berbeda setiap pembukaan rekening efek dapat dihindari dan proses pengkinian data lebih seragam karena tersentralisasi.

Dalam perkembangan lain, OJK mencatat adanya pertumbuhan pada perusahaan pembiayaan *buy now pay later* (PP BNPL) sebesar 33,25% secara tahunan atau bertambah sebanyak 18,18 juta kontrak baru.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono mengatakan, bahwa berdasarkan pertumbuhan tersebut jumlah kontrak PP BNPL menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023 dari 54,70 juta kontrak pada periode sebelumnya.

"Berdasarkan Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, jumlah kontrak PP BNPL mengalami pertumbuhan sebanyak 18,18 juta kontrak atau sebesar 33,25% yoy dari 54,70 juta kontrak per Mei 2022 menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023," kata Ogi.

Ogi menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong pengguna PP BNPL semakin meningkat adalah adanya proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan cepat, serta semakin maraknya promo menarik dalam produk BNPL.

"PP BNPL menawarkan berbagai jenis promo kepada para calon debiturnya antara lain program diskon, *cashback*, program cicilan 0% dan sebagiannya," imbuhnya.

Adapun, peningkatan tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Kredivo sebagai salah satu *platform* BNPL di Indonesia, dimana pengguna layanan BNPL tercatat menjadi 45,9% di 2023 dari 28,2% di 2022.

Dalam riset tersebut juga menyatakan bahwa seiring dengan semakin konsistennya edukasi terkait produk BNPL di masyarakat, mendorong penggunaan *paylater* yang mulai beralih untuk membelanjakan kebutuhan bulanan dengan cicilan tenor pendek sebanyak 56,8% dibandingkan untuk kebutuhan mendadak sebesar 52,1%. (*)

LSPPI
LSP PEMBIAYAAN INDONESIA

PENGUMUMAN
HATI-HATI PENIPUAN!!!

Kepada seluruh Perusahaan Pembiayaan/Perusahaan dan seluruh calon peserta sertifikasi agar berhati-hati terhadap maraknya penipuan yang berkaitan dengan proses sertifikasi.

Perlu kami informasikan bahwa jika ada yang mengatasnamakan Manajemen/Karyawan LSPPI dan menawarkan serta menjanjikan adanya **sertifikasi tanpa ujian dan langsung mendapatkan sertifikat**, dipastikan itu **TIDAK BENAR**.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya.

Terimakasih.



Kontak Resmi LSPPI :

021-2982-0180

www.sppi.id

@lsppi.id



MARAK AKUISISI OLEH INVESTOR ASING

Prospek Menjanjikan Industri Pembiayaan

JAKARTA — Daya tarik industri keuangan nonbank (IKNB), termasuk industri pembiayaan di Tanah Air tak pernah surut. Investor lokal maupun asing masih melihat peluang pasar keuangan sangat menjanjikan.

Investor dari luar negeri berbondong-bondong untuk menanamkan modalnya di industri keuangan Indonesia. Satu contohnya langkah yang dilakukan raksasa keuangan dari Jepang, MUFG Bank Ltd. (MUBK) dan anak usahanya PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance) yang mengambil alih 80,6% saham PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) senilai Rp7 triliun.

Aksi akuisisi tersebut rencananya akan rampung pada awal tahun depan. Langkah MUFG itu memperkokoh posisinya di industri pembiayaan Indonesia setelah pada 2018 perusahaan itu mengakuisisi Adira Finance.

Pada November lalu, induk MUBK yakni Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) juga mengumumkan akusisi terhadap entitas pembiayaan Home Credit Group BV yang beroperasi di Indonesia dan Filipina.

MUFG bukan satu-satunya investor asing yang terpikat pada perusahaan pembiayaan di Indonesia. KB Kookmin Card Corp, perusahaan kartu kredit asal Korea Selatan, mengakuisisi 80% saham PT Finansia Multi Finance senilai 94,9 miliar won atau setara Rp1,1 triliun pada November 2019.

Mengekor KB Kookmin, Grup Modalku pada November 2022, yang sebagian sahamnya dimiliki Funding Asia Group Pte. Ltd asal Singapura, mengakuisisi PT Buana Sejahtera Multidana yang kemudian berubah nama menjadi PT Modalku Finansial Indonesia (Modalku Finance).



Modalku Finance kemudian berbisnis konvensional dengan memilih menyalurkan pembiayaan dana tunai untuk UMKM.

Ada juga Moladin Group, p*latform omnichannel* mobil bekas, yang mengakuisisi PT Pro Car International Finance untuk melebarkan sayap ke bisnis pembiayaan mobil bekas. Setelah diambil alih, dengan nilai kesepakatan akuisisi yang tak diungkapkan, Pro Car Finance berubah nama menjadi PT Moladin Finance Indonesia (MOFI).

Moladin terafiliasi dengan perusahaan asing setelah pada 2022 memperoleh pendanaan seri A senilai US$42 juta atau Rp654 miliar, a.l. oleh Sequoia Capital India dan Northstar Group asal Singapura.

Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang W. Budiawan mengatakan bahwa aksi korporasi oleh pemodal asing yang mengincar industri pembiayaan di Indonesia diperkirakan masih marak.

Menurutnya, investor asal Korea Selatan, Jepang, China, dan Singapura cukup aktif menjajaki peluang invetasi lewat skema *merger* dan akuisisi perusahaan pembiayaan.

"Kemungkinan menyusul akhir tahun ini, bahkan sampai awal tahun depan yang berasal dari China dan Korea Selatan. Mereka sedang dalam *due diligence* pada perusahaan pembiayaan yang jadi target," katanya.

Bambang menyatakan akusisi perusahaan pembiayaan oleh entitas asing tentu saja memiliki dampak positif, terutama dari sisi penguatan permodalan dan transfer teknologi.

Hanya saja, katanya investor juga perlu memahami karakter pasar Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menilai gencarnya investor asing mengakuisisi perusahaan pembiayaan menjadi sinyal industri ini masih memiliki peluang besar untuk terus berekspansi.

"Yang kami tahu bahwa pasar untuk perusahaan pembiayaan itu masih besar khususnya di pembiayaan, alat berat, kendaraan motor dan mobil," kata Suwandi.

Menurutnya, langkah investor asing mengakuisisi perusahaan pembiayaan Indonesia agar mereka bisa mengembangkan produk pembiayaan yang lebih komprehensif di Tanah Air.

Selain itu, alasan lain investor asing mencaplok perusahaan pembiayaan karena kewajiban ekuitas minimum perusahaan yang hanya Rp100 miliar, lebih ringan jika dibandingkan dengan syarat modal minimum perbankan Rp3 triliun.

Regulator hingga kini masih terus mengawasi pemenuhan ekuitas minimum dari perusahaan pembiayaan senilai Rp100 miliar yang diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No.35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan sejatinya diberi waktu untuk memenuhi modal moinimal Rp100 miliar paling lambat pada 31 Desember 2019. Nyatanya, masih ada belasan perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan modal minimal itu.

Selain permodalan, APPI juga melihat potensi pasar yang gemuk di Indonesia menjadi incaran investor. Sepanjang tahun ini, pertumbuhan piutang pembiayaan sudah menembus digit ganda.

Suwandi menilai masuknya investor asing ke perusahaan pembiayaan Indonesia karena ingin mengembangkan investasi dan mendapatkan

imbal hasil yang lebih jika dibandingkan di negeri sendiri.

"Investor ingin mengembangkan hasil investasi yang lebih. Di sini mereka bisa dapat *return* yang cukup baik," katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono mengatakan aksi itu tengah direncanakan oleh calon investor baik dari dalam maupun luar negeri.

OJK juga menyampaikan terdapat satu perusahaan pembiayaan yang telah diakuisisi oleh investor dari luar negeri. Meski demikian, OJK tidak menjelaskan secara detail aksi apakah akuisisi tersebut dilakukan untuk mengejar pemenuhan kewajiban ekuitas minimal Rp100 miliar atau untuk ekspansi bisnis.

Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan fenomena konsolidasi perusahaan pembiayaan merupakan salah satu strategi untuk bertahan di tengah tantangan ekonomi, kenaikan inflasi, hingga tekanan suku bunga selama transisi pandemi.

Aksi ini juga dilakukan agar perusahaan pembiayaan berekspansi ke lini usaha yang dipandang menguntungkan dalam jangka panjang.

"Mau tidak mau mereka harus melakukan *merger* atau akuisisi dengan perusahaan pembiayaan lainnya yang di-*backup* oleh perbankan," jelas Bhima.

Dengan *merger*, akuisisi, atau konsolidasi, Bhima melihat perusahaan pembiayaan akan semakin fokus menyalurkan produk, yang juga didorong karena kebutuhan belanja modal yang cukup besar. Aksi korporasi ini juga diharapkan mengerek modal inti serta meningkatkan manajemen risiko.

"Dengan begitu, perusahaan pembiayaan dalam jangka panjang bisa bertahan. Karena sekarang perusahaan pembiayaan juga digempur dari berbagai sisi, mulai dari perbankan, *paylater*, hingga *platform* di luar perusahaan pembiayaan konvensional," ujarnya.

Khusus soal rencana akuisisi Mandala Finance oleh MUFG dan Adira Finance, Managing Director Mandala Finance Christel Lasmana mengatakan pengambilalihan nantinya tidak berdampak pada pengurangan karyawan alias pemutusan hubungan karyawan (PHK).

> **Investor ingin mengembangkan hasil investasi yang lebih. Di sini mereka bisa dapat *return* yang cukup baik.**

"Pengambilalihan ini tidak berpengaruh terhadap aktivitas operasional Mandala saat ini, termasuk pengelolaan sumber daya manusia [karyawan] di Mandala," kata Christel kepada Bisnis.

Christel menuturkan perseroan akan tetap melangsungkan bisnis seperti biasa dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan seperti yang telah perusahaan lakukan selama ini.

Dia menyebut rencana pengambilalihan saham perusahaan juga sejalan dengan semangat Mandala Finance untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan.

"Rencana pengambilalihan ini agar kami bisa memperkuat posisi kami sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia dan melayani lebih banyak masyarakat hingga ke seluruh wilayah Indonesia," ungkapnya.

Christel menuturkan dukungan yang lebih besar dari MUFG Group, berharap Mandala Finance dapat memanfaatkan sinergi dengan anak perusahaan MUFG Group di Indonesia. (*)

APPI ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA

Maju Berkat Pembiayaan Kini Hadir dengan Logo Baru



Maju Berkat Pembiayaan

Warna Biru,
merepresentasikan rasa kepercayaan, kesungguhan, pertumbuhan, dan kredibilitas.

Warna Kuning,
menandakan energi, optimisme, dan kreativitas yang terdapat dalam perusahaan APPI.

Elemen ini menggambarkan manusia dengan bulat sebagai kepala dan bentuk cekung sebagai tubuh manusia. Bentuk bulat melambangkan sebuah wadah bagi para anggota asosiasi untuk saling bekerjasama. Bentuk cekung menandakan semangat juang dari anggota asosiasi.

Simbol tersebut juga mengilustrasikan sebuah medali yang berarti APPI dan perusahaan pembiayaan ikut serta dalam pemberian edukasi/literasi terkait keuangan khususnya pembiayaan kepada masyarakat.

Dalam logo ini menggambarkan 3 jenis pembiayaan utama yang dilakukan multifinance dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Perpaduan bentuk tersebut melambangkan hubungan yang saling berkesinambungan antara APPI, perusahaan pembiayaan, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan perekonomian Indonesia.

APPI ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA

Maju Berkat Pembiayaan

PENGHARGAAN DEBITUR

Maju Berkat Pembiayaan 2023





Hadiah 2 Unit Sepeda Motor untuk 2 Orang Pemenang

Penilaian Penghargaan Maju Berkat Pembiayaan Berdasarkan:

- Debitur **Perorangan** perusahaan Pembiayaan yang loyal dan memiliki catatan pembayaran yang baik
- **Terbukti maju** dalam usaha atau pekerjaannya setelah mendapatkan "pembiayaan" dari Perusahaan Pembiayaan
- Menciptakan **lapangan pekerjaan** bagi orang lain
- Mampu menciptakan **produk / kreatifitas baru**
- Sudah lama menjadi debitur perusahaan pembiayaan (**minimal 5 tahun**)
- Semakin **detail dan jelas** data debitur yang diberikan, **semakin besar** peluang untuk menang
- **Data pelanggan (debitur) bersifat rahasia** dan tidak akan disebarluaskan oleh APPI kepada pihak manapun
- Keputusan panitia bersifat **final dan tidak dapat diganggu gugat**

Pendaftaran melalui link :
bit.ly/FormMajuBerkatPembiayaan2023

Paling lambat 14 Agustus 2023

Informasi hubungi Sekretariat APPI: (62-21) 2982 0190 (62-21) 2982 0191 sekretariat@ifsa.or.id



Seminar Executive Proficiency Program & Basic Finance Certification

Pada 26 Juli 2023, bertempat di Hotel Pullman Jakarta Thamrin CBD. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengadakan Seminar Executive Proficiency Program & Basic Finance Certification.

Seminar Executive Proficiency Program merupakan acara sertifikasi keahlian di bidang pembiayaan untuk direksi perusahaan pembiayaan dan Basic Finance Certification merupakan sertifikasi di bidang pembiayaan untuk komisaris perusahaan pembiayaan, sebagaimana yang diamanatkan dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 pasal 65. (*)

Seminar Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif Perusahaan Pembiayaan



Dalam rangka pemenuhan kewajiban sertifikasi Manajemen Risiko bagi direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 65 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 tahun 2018, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyelenggarakan Seminar Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif Perusahaan Pembiayaan pada tanggal 11 Juli 2023 di Hotel Pullman Jakarta Thamrin CBD. (*)

PT SGMW Multifinance Indonesia Kembali Memperoleh Tambahan Fasilitas Kredit dari PT Bank Central Asia

PT SGMW Multifinance Indonesia (Perusahaan) kembali memperoleh tambahan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk (Bank BCA) sebesar 1 Triliun rupiah dengan jangka waktu kredit selama 4 tahun, fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis Perusahaan khususnya dalam membiayai kendaraan merek Wuling yang diproduksi oleh PT SGMW Motor Indonesia. Akta fasilitas kredit tersebut telah ditandatangani bersama di kantor pusat Perusahaan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, diwakili oleh Bapak Noel Krisnandar Yahja selaku Direktur Keuangan PT SGMW Multifinance Indonesia dan Bapak Raymond Tanuwibowo selaku Executive VP Group Corporate Banking & Corporate Finance Bank BCA.

Perusahaan telah mendapatkan dukungan pendanaan dari Bank BCA sejak tahun 2019 sampai



dengan saat ini, dengan total fasilitas yang telah didapatkan secara akumulasi sebesar 3,2 Triliun Rupiah. Selanjutnya, Perusahaan dan Bank BCA senantiasa untuk terus meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan guna mendukung kemajuan dan kelangsungan bisnis Perusahaan. (*)

DAFTAR ANGGOTA APPI

AB SINAR MAS MULTIFINANCE
Menara Tekno Lantai 7
Jl. KH Fachrudin No.19, Kel. Kampung Bali,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Tlp: (021) 3925660

ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
Millennium Centennial Center Lt 56
Jl. Jend. Sudirman No.Kav 25, RT.4/RW.2,
Kuningan, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12920
Tlp: 39733232, 39733322 Fax: 39734949

ADICIPTA INOVASI TEKNOLOGI
Graha Adicipta Jl. Kebon Jeruk Raya No. 80
Jakarta Barat 11530
Tlp: 53673030

ADITAMA FINANCE
Plaza Bank Index, 8th Floor
Jl. M. H. Thamrin Kav. 57, Jakarta Pusat
Tlp: 31931006 Fax: 31931016

AEON CREDIT SERVICE INDONESIA
3A Plaza Kuningan South Tower,
Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-14 Jakarta 12940
Tlp: 252 3331 Fax: 5288 0232 / 0231

AKULAKU FINANCE INDONESIA
Sahid Sudirman Centre Lt. 11-C
Jl. Jendral Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220
Tlp: 021-50818930

AL IJARAH INDONESIA FINANCE
Muamalat Tower Lantai 3,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan Timur,
Setia Budi – Jakarta Selatan 12940
Tlp: 021–50919921/22

ANADANA GLOBAL MULTIFINANCE
Gading River View Blok H 56 B,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tlp: 45869941

ANUGERAH BUANA CENTRAL MULTIFINANCE
Jl. Raden Tumenggung Suryo No. 28
Malang, Jawa Timur 65123
Tlp: 0341-491222 Fax: 0341-470079

ARMADA FINANCE
Jl. Jend. Sudirman No. 165, Magelang 56125
Tlp: (0293) 313777 Fax: (0293) 313888

ARTHA PRIMA FINANCE
Grand Slipi Tower Lantai 32,
Jl. S. Parman Kav. 22-24 Slipi
Jakarta Barat 11480, Tlp: 2902 2071/72
Fax: 2902 2085

ARTHAASIA FINANCE
Gedung Kencana Tower Lantai 5-6
Business Park Kebon Jeruk
Jl. Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11620,
Telp. 021. 58908189 atau 021. 58908190
Fax. 021. 58908146

ASIA MULTIDANA
Jl. Pluit Indah Raya No. 31 Lt. 2
Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
Tlp:22673031 / 22673038

ASIATIC SEJAHTERA FINANCE
Ruko Karawaci Office Park Excelis 51,
Lippo Karawaci, Tangerang 15810
Tlp: 5510200 Fax: 5510898

ASLI RANCANGAN INDONESIA
Senayan Business Center
Jl. Senayan No.39 Rawa Barat,
Jakarta 12180
Tlp:22775752 / 22775752

ASTRA AUTO FINANCE
Jl. TB Simatupang No. 90,
Tanjung Barat, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000
Fax: 788 51220, 788 51198

ASTRA MULTI FINANCE
Menara FIF Lt.10,
Jl. TB. Simatupang, Kav. 15 Lebak Bulus,
Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Tlp: 769 8899 Fax: 769 8811

ASTRA SEDAYA FINANCE
Jl. TB Simatupang No. 90 Tanjung Barat,
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000
Fax: 788 51220, 788 51198

ASTRIDO PACIFIC FINANCE
Toyota Building 3rd Floor,
Jl. Balikpapan Raya No. 7, Jakarta 10160,
Tlp: 231 2220, 231 2221
Fax: 231 0053/345 1334

ATOME FINANCE INDONESIA
District 8 Treasury Tower Lantai 53 Unit C
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 54
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

AYOPOP TEKNOLOGI INDONESIA
APIC Building Wahid Hasyim,
Jalan Wahid Hasyim No 154-156,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Tlp: 40011091

BATARA INTERNASIONAL FINANSINDO
Komp. Ruko Wolter Monginsidi
Jl. Wolter Monginsidi No. 88 N
Jakarta Selatan
Tlp: 719 6488 Fax: 719 6489

BCA FINANCE
Wisma BCA Pondok Indah Lt.8, Jl. Metro Pondok Indah
Sektor I-S Kav. No. 10, Jakarta Selatan 12310
Tlp: 299 73100 Fax: 29973232/33

BCA MULTI FINANCE
Gedung WTC Mangga DUa Lantai 6 Blok CL 001
Jl. Mangga Dua Raya No. 8, Jakarta Utara 14430
Tlp: 29648200

BETA INTI MULTIFINANCE
Ruko The Greencourt Blok D08
Jl. Boulevard Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat
Tlp: 5309331 Fax: 5363549

BFI FINANCE INDONESIA
BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2,
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang
Tlp: 296 50300
www.bfi.co.id

BHUMINDO SENTOSA ABADI FINANCE
Jl. Balikpapan Raya No. 24 Lt. Dasar,
Jakarta Pusat 10130
Tlp: 632 1111 Fax: 631 8555

BIMA MULTI FINANCE
Jl. Cideng Barat No. 47i, Jakarta Pusat
Tlp: 638 58555 Fax: 638 58001

BINTANG MANDIRI FINANCE
Graha Bintang Cikini,
Jl. Cikini Raya No 55, Menteng. Jakarta Pusat
Tlp: 3983 0391 Fax: 3192 4731/32

BNI MULTIFINANCE
Graha Binakarsa
Lt. 11 Lot E - F & Lt. 12,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-18,
Jakarta Selatan 12940

BOSOWA MULTI FINANCE
Menara Global Lt. 21
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 27
Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 5275230

BRI MULTIFINANCE INDONESIA
Menara BRILiaN Lt. 1,21,dan 22
Jl. Gatot Subroto Kav. 64,
Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan 12870
Tlp: (021) 5745333

DAFTAR ANGGOTA APPI

BUANA FINANCE
Tokopedia Tower
Ciputra World 2 Lt 38, Unit A - F
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11 Jakarta 12950
Tlp: 50806969 Fax: 50806996

BUMIPUTERA - BOT FINANCE
Wisma Bumiputera, 11th & 12th Floors,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
Tlp: 570 6762, 522 4522 Fax: 525 561

BUSSAN AUTO FINANCE
BAF Plaza, Jl. Raya Tanjung Barat No.121, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530
Tlp: 29396000 Fax: 29396100

CAKRAWALA CITRAMEGA MULTIFINANCE
Jl. Raya Kelapa Dua Ruko Blitz 2 Blok C No.17-19,
Paramount Serpong, Kel. Kelapa Dua, Tangerang 15810
Tlp: 22229200, 22229449

CAPELLA MULTIDANA
Jl. Sunter Paradise Timur Raya Blok G2 No. 4-5
Jakarta Utara
Tlp: 640 1001 Fax: 640 1003

CATERPILLAR FINANCE INDONESIA
Beltway Office Park Tower C,
Level 3 unit 3-01 & 3-04,
Jl. TB Simatupang No. 41
Jakarta Selatan 12550
Tlp: 021-29392999

CATURNUSA SEJAHTERA FINANCE
Traveloka Campus (d/h Green Office Park 1), South
Tower, Lantai 2, Zone 9, Jl Grand Boulevard, BSD Green
Office Park, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15345
Tlp: (021) 29775800

CENTRAL JAVA POWER
Summitmas Tower I Lt. 15,
Jl. Jend Sudirman Kav 61-62, Jakarta 12190
Tlp: 520 5041 Fax: 520 2474

CHAILEASE FINANCE INDONESIA
Wisma 46, Lantai 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,
Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10220
Tlp: 021-25096888

CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING
Gedung TMT 1 Lt.6,
Jl. Cilandak KKO Raya No. 1 Jakarta 12560
Tlp: 299 76650
Fax: 299 76651

CIMB NIAGA AUTO FINANCE
Jalan Bintaro Utama 9 Blok B9/I No. 15
Bintaro Jaya Sektor IX,
Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15229
Telp. (021) 2788-1800

CIPTADANA MULTIFINANCE
Plaza ASIA, Office Park 2-3,
Jl. Jend Sudirman Kav 59, Jakarta 12190
Tlp: 255 74800 Fax: 255 74900, 514 01020

CITIFIN MULTIFINANCE SYARIAH
Jl.R.S. Fatmawati No.29. Jakarta Selatan 12430
Telp : 021-7650222, 7662044 Fax : 021-7661337

CLEMONT FINANCE INDONESIA
Wisma Korindo Lantai 7
Jl. MT Haryono Kav 62 Jakarta 12780
Tlp: 797 6363
Fax: 797 6371, 797 6368

CLIPAN FINANCE INDONESIA
Gedung Wisma Slipi Lt. 6,
Jl. Letjen. S. Parman
Kav. 12, Jakarta Barat 11480
Tlp: 530 8005 Fax: 530 8026/27

COMMERCE FINANCE
Sopo Del Tower Lantai 32,
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6, RT.3/RW.3,
Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Tlp: 80864285

DAINDO INTERNASIONAL FINANCE
Jl. KH Hasyim Ashari No. 35A Lt. 5
Jakarta Pusat 10150
Tlp: 6323308 Fax: 6323307

DANAREKSA FINANCE
Gedung Plaza BP Jamsostek Lt. 12
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Jakarta 12910
Tlp: 29555777 Fax: 3522495

DANA KINI FINANCE
Gedung Kawan Lama Jl. Puri Kencana No. 1,
Kembangan, Meruya, Jakarta Barat 11610
Tlp: 5828282

DANA UNICO FINANCE
Gedung Dana Paint Lt.2, Jl. Pemuda Ujung,
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
Tlp: 29847799 Fax: 29834903

DIPO STAR FINANCE
Sentral Senayan II LT.3. Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta
Tlp: 579 54100 Fax: 579 74567

EMAS PERSADA FINANCE
Jl. Daan Mogot No. 50
(Depan Pintu Air 10)
Tangerang 15111

EMPEROR FINANCE INDONESIA
Gedung Graha BIP, Lantai Mezzanine
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930
Tlp: 29660826 Fax: 29660816

EQUITY FINANCE INDONESIA
Wisma Hayam Wuruk Lt. 8,
Jl. Hayam Wuruk No.8 Kel. Kebon Kelapa,
Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10120
Tlp: 80632888

FAZZ CAPITAL FINANCE
Menara Prima Lt. 10
Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6-2
Kuningan Timur, Jakarta Selatan
Tlp: 50914792

FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Menara FIF Lt.3-9, Jalan TB Simatupang Kav.15,
Cilandak, Jakarta 12440
Tlp: 769 8899
Fax: 7590 5599

FORTUNA MULTI FINANCE
Jalan Sultan Syahrir Abdurahman No. 1A
Gedung Aneka Pavilion Lt.5, Pontianak

FUJI FINANCE INDONESIA
Menara Sudirman Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman Kav.60, Jakarta 12190
Tlp: 5226509 Fax: 5226517

GLOBALINDO MULTI FINANCE
Gedung Victoria Lantai 3 Unit 305
Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 47-51
Jakarta Selatan
Tlp: 7396949

GRATAMA FINANCE INDONESIA
Plaza ASIA Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Tlp: 5140 2228 Fax: 5140 2224

HASJRAT MULTIFINANCE
Jl. R.P. Soeroso 38, Jakarta 10350
Tlp: 390 5912-14, 390 0719.
Fax: 314 0609, 390 4114

HEWLETT-PACKARD FINANCE INDONESIA
Prudential Centre,
Kota Casablanca Level 9, unit A-H.
Jl. Casablanca Kav. 88
Jakarta Selatan 12870. Tlp: 29639999

HEXA FINANCE INDONESIA
Gedung Trinity Lantai 15 Nomor 01-03 dan 05
Jl. HR Rasuna Said No. 6, Karet, Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
Tlp: 2526820 Fax: 2526821

HINO FINANCE INDONESIA
Indomobil Tower Lt. 17, Jl. MT. Haryono Kav. 11
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur
Tlp: 29827960 Fax: 29827961

HOME CREDIT INDONESIA
Plaza Oleos Lantai 8 & 9 Jl. TB. Simatupang
No. 53A. Jakarta 12520, Indonesia
Telp: +62 21 295 39655 Fax: +62 21 227 80155

HONEST FINANCIAL TECHNOLOGIES
Gedung Metropolitan Tower Lt. 3 ABEF,
Jl. RA. Kartini TB. Simatupang Kav. 14,
Cilandak Barat, Cilandak
Jakarta Selatan 12430
Tlp: 27652022 Fax: 27652023

DAFTAR ANGGOTA APPI

IFS CAPITAL INDONESIA
Rukan Cordoba Blok G No. 37
Jl. Marina Raya – Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara
Tlp: 22573029

INDOCYBER GLOBAL TEKNOLOGI
Sampoerna Strategic Square, South Tower
Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
Tlp: 5663705 Fax: 5663704

INDONESIA INTERNATIONAL FINANCE
Gedung Menara Batavia Lantai 21 Unit A,
Jl. KH. Mas Mansyur Kav.126 Jakarta Pusat 10220
Tlp: 021-2519 5577

INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
Indomobil Tower Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Tlp: 29185400 Fax: 29185401

INOVASI MITRA SEJATI
The Smith @ Alam Sutera,
5th Fl. Suite 01-17
Tangerang, Banten 15315
Tlp: (021) 3973 – 0397

INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE
Gunung Sahari Raya Komp. Ruko Mangga Dua Square
Blok E. 19-20, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14430
Tlp: 6251900 Fax: 6252900

ISID INDONESIA
Gedung Menara Sentraya Lt. 17 Unit B-1
Jalan Iskandarsyah Raya No. 1A
Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tlp: 27881993

ITC AUTO MULTI FINANCE
Lantai 21 Gama Tower, Jl. HR Rasuna Said Kavling C 22,
Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Tlp: 22057027 Fax: 22057045

JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE
Lippo Kuningan 25th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.
B-12 Kuningan, Jakarta 12940
Tlp: 2971 0100 Fax: 2911 0313

JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE
Jl. Pecenongan Raya No. 45,
Jakarta Pusat 10120
Tlp: 352 2238 Fax: 384 2104

KARYA TECHNIK MULTIFINANCE
Jl. Kali Besar Barat No. 37, Jakarta 11230
Tlp: 691 0382 Fax: 691 6267

KARUNIA MULTIFINANCE
Graha Anabatic Lt. 10, Jl. Scientia Boulevard Kav. U2,
Summarecon Serpong, Tangerang 15811
Tlp: 80636000 Fax: 80636001

KB BUKOPIN FINANCE
Gedung PT. KB Bukopin Finance
Jl. Melawai Raya No. 66, Kramat Pela, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160
Tlp: 72789683 Fax: 7278908

KB FINANSIA MULTI FINANCE
SCBD Lot 28 Office 8 Lt. 15,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190,
Tlp: 2933 3646 Fax: 2933 3648

KDB TIFA FINANCE
Equity Tower Lt. 39, SCBD Lot 9
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 021-50941140

KOEXIM MANDIRI FINANCE
Equity Tower Lt. 50 Suite 50E SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 021-51400777

KOMATSU ASTRA FINANCE
Gedung International Financial Centre Lantai 12 B,
Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 22-23, Kuningan, Karet
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Tlp: 021-50927450 Fax: 021-50927459

KREDIT BIRO INDONESIA JAYA
Menara Batavia Lt. 21
Jl. K.H. Mas Mansyur No. Kav. 126
Jakarta Pusat 10220
Tlp: 5747435

KREDIVO FINANCE INDONESIA
Dipo Tower, Lantai 3 Unit A-B,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Petamburan,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260
Telp: 021-22055677

KRESNA REKSA FINANCE
Plaza ABDA Lantai 28,
Jl. Jend Sudirman Kav. 59. Jakarta Pusat 12190
Tlp: 514 01725-27 Fax: 514 01728

LAZADAPAY MULTIFINANCE INDONESIA
Capital Place Lantai 20 & 21,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan
Tlp: 021- 29184944

LOTTE CAPITAL INDONESIA
Wisma Keiai 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.3, Jakarta
Tlp: 572 4255 Fax: 572 4256

MANDALA MULTI FINANCE
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B
Jakarta Pusat 10340
Tlp: 2925 9955
Fax: 2925 9961

MANDIRI TUNAS FINANCE
Graha Mandiri Lantai 3A,
Jl. Iman Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Tlp: 230 5608
Fax: 230 5618

MANDIRI UTAMA FINANCE
Menara Mandiri I 26-27th floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan 12190
Tlp: 5278038 Fax: 5278039

MAYBANK INDONESIA FINANCE
Gd. Wisma Eka Jiwa Lt.10,
Jl. Mangga Dua raya. Jakarta Pusat 10730
Tlp: 623 00088 Fax: 623 00099

MEGA FINANCE
Jl. Wijaya I No. 19 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12170
Tlp: 728 00818 Fax: 728 00978

MEGA AUTO FINANCE
Wisma 76 Lt. 12 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76 Slipi,
Jakarta Barat 11410
Tlp: 536 66627/28 Fax: 536 66697/98

MEGA CENTRAL FINANCE
Wisma 76 Lt. 12 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76 Slipi,
Jakarta Barat 11410
Tlp: 536 66627, 536 66628 Fax: 536 66698

MITRA DANA TOP FINANCE
Gedung Top Center
Jl. KH Hasyim Ashari No. 13-13A Jakarta Pusat.
Tlp: 638 66017/18 Fax: 021-6307273

MITSUBISHI HC CAPITAL AND FINANCE INDONESIA
Mid Plaza 2 Building, lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 10-11, Jakarta 10220
Telp. 573 5905 Fax. 573 5906

MITRA ADIPRATAMA SEJATI FINANCE
Gedung Graha Deka
Jl. Raya Kranggan No.120 RT 03 RW 006,
Kelurahan Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna,
Bekasi, Jawa Barat
Tlp: Tlp: 84596099 Fax:

MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA
Plaza Bank Index Lt. 11.
Jl. MH Thamrin No. 57,
Gondangdia, Menteng. Jakarta Pusat 10350
Tlp: 3903238 Fax: 3903245

MIZUHO LEASING INDONESIA
Menara Astra Lantai 32
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6
Jakarta 10220
Tlp: 50851848 Fax: 50851849

MNC FINANCE
MNC Financial Center Building 12th Floor,
Jl. Kebon Sirih No. 21-27. Jakarta Pusat 10340
Tlp: 2970 1111 Fax: 3929938

MNC GUNA USAHA INDONESIA (MNC LEASING)
MNC Tower Lt.23. Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Kebon Sirih,
Jakarta Pusat 10340
Tlp: 3910993 Fax: 3911093

MULTIFINANCE ANAK BANGSA
Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai 4, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kel. Melawai,
Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160

DAFTAR ANGGOTA APPI

MULTINDO AUTO FINANCE
Jl. Pandanaran No. 119A, Semarang 50243
Tlp: (024) 8311130
Fax: (024) 8445254, 8445650

MUTIARA MULTI FINANCE
Aldeoz Building Lt.5,
Jl. Warung Bucit Raya No.39, Kec.Pancoran
Jakarta Selatan 12740
Tlp: 27534112 Fax: 27534494

MODALKU FINANSIAL INDONESIA
Unifam Tower, Lt. 10,
Perkantoran Sunrise Garden,
Blok A3 No. 1-7, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat

MOLADIN FINANCE INDONESIA
Menara Sentraya Lt. 15 Unit B1
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Melawai Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160
Tlp: 021-7255584

NFSI FINANCIAL SERVICES
Indomobil Tower Lt. 12,
Jl. MT Haryono Kav.11,
Jakarta Timur 13330
Tlp: 29185400

NSC finance
KREDIT SEPEDA MOTOR DAN MOBIL

NUSA SURYA CIPTADANA
The Victoria Lantai 5-7 Jl. Tomang Raya Kav. 35-37,
RT 12 / RW 05, Tomang, Kec. Grogol Petamburan, kota
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440

ORICO BALIMOR FINANCE
Graha 137 Lt 7, Jl. Pangeran Jayakarta No. 137 Jakarta.
Tlp: 639 3877 Fax: 628 7950

ORIX INDONESIA FINANCE
Wisma Keiai, 24th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta
Tlp: 572 3041 Fax: 572 3074

OTO MULTIARTHA
Gedung Summitmas II, Lantai 18,
Jl. Jend. Sudirman Kav.61-62, Jakarta
Tlp: 522 6410
Fax: 522 6424

PACIFIC MULTI FINANCE
Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 12A
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.38
Jakarta 12710
Tlp: 39506144

PANN PEMBIAYAAN MARITIM
Gedung PT. PANN, Jl. Cikini IV No. 11
Jakarta Pusat
Tlp: 3192 2003 Fax: 3192 2980

PARAMITRA MULTIFINANCE
Kompleks Simprug Gallery,
Jl. Teuku Nyak Arief No.10-R. Jakarta 12220
Tlp: 727 87845
Fax: 727 87846

PEFINDO BIRO KREDIT
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp: 5154501

PERMATA FINANCE INDONESIA
Gedung Waringin Group Lantai 3
Jl. Kesehatan No 22. Jakarta Pusat 10150
Tlp: 3867319 Fax: 3867321

POOL ADVISTA FINANCE
Jl. Soepeno Blok CC6 No.9-10, Arteri Permata Hijau,
Kel. Grogol, Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Tlp: 80626300

PPA FINANCE
Gedung Plaza BP Jamsostek, Lantai 10
Jl. HR Rasuna Said Kavling 112 Blok B,
Jakarta 12940
Tlp: 021 - 5798 2255 Fax: 021 - 5798 2266

PRATAMA INTERDANA FINANCE
Wisma SMR Ground Fl,
Jl. Yos Sudarso, Kav. 89. Jakarta 14350
Tlp: 650 2222 Fax: 650 8141

PROLINE FINANCE INDONESIA
Plaza Asia Lt. 8A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 51401260 Fax: 51401267

RABANA INVESTINDO
Jl. Tomang Raya No. 48A, Jakarta 11430
Tlp: 566 9808-10 Fax: 567 1646, 566 9820

RADANA BHASKARA FINANCE
CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16,
Jl TB Simatupang No. 2 RT001/RW005,
Jakarta 12560
Tlp: 50503333

REKSA FINANCE
Ruko Patal Senayan
Jl. Tentara Pelajar Rukan Permata Senayan
Blok B No. 3 & 5, Grogol Utara
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Tlp: 57940662

RESONA INDONESIA FINANCE
Sampoerna Strategic Square
South Tower Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan - 12930
Telp: (021) 570 1956 Fax: (021) 570 1961

RINDANG SEJAHTERA FINANCE
Gedung Jaya Lt. 3, Jl. MH Thamrin No. 12. Jakarta.
Tlp: 2300919 Fax: 2300919

SAISON MODERN FINANCE
Menara Rajawali Lantai 10
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Tlp: 57950571

SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA
AXA Tower Lt.32 Suite 03, Kuningan City
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setia Budi
Jakarta Selatan 12940
Tlp: 30480655 Fax: 30480755

SARANA MAJUKAN EKONOMI FINANCE INDONESIA
Gedung SME Finance Center
Jl.Abdul Muis No.28,
Petojo Sel/Gambir
Jakarta Pusat, 10160

SATYADHIKA BAKTI FINANCE
Office Tower The Samator Lt. 9 Unit 8-10
Jl. Raya Kedung Baruk No. 26-28
Surabaya 60298
Tlp: 031-99004251

SEMBRANI FINANCE INDONESIA
Carro Square, Lt. 1, Pondok Indah,
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 41, RW. 4,
Kby. Lama Utara, Kby Lama,
Jakarta Selatan 12240
Tlp: 021-50688008

SGMW MULTIFINANCE INDONESIA
Gedung FX Sudirman Lt. 7 No. 5, Jl. Jend Sudirman
Pintu Satu Senayan, Gelora, Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10270
Tlp: 22535050

SHAKTI TOP FINANCE
Gedung Top Center Jl. KH Hasyim Ashari
No. 13-13A, Jakarta Pusat
Tlp: 63866017 Fax: 6306880

SHARIA MULTIFINANCE ASTRA
Gedung Menara FIF Lt.3 Suite 303
Jl. TB Simatupang, Lebak Bulus. Jakarta Selatan
Tlp:7698899 Fax:75905599

SHINHAN INDO FINANCE
Wisma Indomobil I Lt. 10,
Jl. MT. Haryono, Kav. 8, Jakarta 13330
Tlp: 857 9095 Fax: 857 4171

SINARMAS HANA FINANCE
Gedung Roxy Square Lt. 3
Blok B 01 No. 2. Jakarta Barat 11440
Tlp: 56954670 Fax: 56954678

SINAR MITRA SEPADAN FINANCE
Gedung Agro Plaza Lt. 17
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 No.1
Kuningan Timur, Setiabudi.
Jakarta Selatan 12950
Tlp: 80864900 Fax: 80864950

SINARMAS MULTIFINANCE
Jl.Lombok No 71
Menteng Gondangdia
Jakarta pusat

SMART MULTI FINANCE
Jl. BSD Boulevard Utara,
Foresta Business Loft 6 No. 20-21, BSD,
Kab.Tangerang, Prov. Banten, 15331
Tlp: (021) 3972 1010, 3972 5050

DAFTAR ANGGOTA APPI

SMFL LEASING INDONESIA
Menara BTPN Lt.31,
Jl. Dr. Ide. Agung Gde Agung, Kav. 5.5 - 5.6
Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950
Tlp: 80628710 Fax: 80628719

SUMMIT OTO FINANCE
Summitmas II, 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 61-62, Jakarta Selatan 12190
Tlp: 252 2788, 522 6601
Fax: 252 6388

SUNINDO KOOKMIN BEST FINANCE
Jl. Sahid Sudirman Center Lantai 50 Unit A dan E.
Jalan Jend. Sudirman No.86
Jakarta Pusat 10220

SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE
18 Office Park Lantai 23,
Jl. TB Simatupang No. 18. Jakarta 12520
Tlp: 781 7555 Fax: 781 9111,788 47224

SUZUKI FINANCE
KREDIT RESMI SUZUKI

SUZUKI FINANCE INDONESIA
Jl. Raya Bekasi Km 19, Pulogadung
Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung
Jakarta Timur 13920
Telp: (021) 8060 7000

SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE
Jl. TB Simatupang No. 90
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000
Fax: 788 51220

TAKARI KOKOH SEJAHTERA
Jl. Arjuna Utara No. 131, Tanjung Duren Selatan,
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Tlp: 564 0101 Fax: 560 3550

TEMPO UTAMA FINANCE
Tempo Scan Tower Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan
Tlp: 29667879

TEZ CAPITAL AND FINANCE
Equity Tower Lt. 29,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp: 50666206

TOPAS MULTI FINANCE
Mayapada Tower 2, Lantai 14 unit 01A, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 27, Kelurahan Karet, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan
Tlp: 2524433

TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
The Tower Lt. 9
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 12. Jakarta Selatan 12930
Tlp: 50821500 Fax: 50821501

TRANSPACIFIC FINANCE
Perkantoran Grogol Permai Blok G24
Jl. Prof. Dr. Latumenten Grogol, Jakarta 12980
Tlp: 5010 2222 Fax: 567 9406

TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE
(TRUE FINANCE)
Trihamas Building
Jl. TB Simatupang Kav. 11,
Tanjung Barat, Jakarta 12530
Tlp: 2933 0533 Fax: 2933 0543

TRIHAMAS FINANCE SYARIAH
Trihamas Building Lt. Dasar
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav.11
Tanjung Barat, Jakarta 12530
Tlp: 29330530 Fax: 29330529

TRIPRIMA MULTIFINANCE
Jl. Joglo Raya No. 17B, RT.007 RW.003
(Sebelah Biznet Pos Pengumben)
Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11630
Telp: 22959040 Fax: 22959041

TRUST FINANCE INDONESIA
Gedung Artha Graha Lt. 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp: 515 5477 Fax: 515 5484

USAHA PEMBIAYAAN RELIANCE INDONESIA
SOHO WESTPOINT Lt. 2, Jl. Macan Kav. 4-5
Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510
Tlp: 021-21192288

VARIA INTRA FINANCE
Asean Tower Jl. K.H. Samanhudi No. 10
Jakarta Pusat
No Tlp: 021-3841388 No Fax: 021-3841015

WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA
Altira Office Tower
Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350
Tlp: 21882400 Fax: 21882420

WOORI FINANCE INDONESIA
Chase Plaza Lt. 16,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920
Tlp: 5200434 Fax: 5209160

Bagi anggota APPI yang ingin mencantumkan logo perusahaan harap menghubungi sekretariat APPI
di No. Telp: (021) 2982 0190 atau email: sekretariat@ifsa.or.id

upcoming event

Seminar Nasional Offline Jakarta
Oktober 2023

Multifinance Day
Oktober 2023

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:
Sekretariat APPI
Kota Kasablanka
(EightyEight@Kasablanka) Tower A Lantai 7 Unit D
Telp: (62-21) 2982 0190,
Fax: (62-21) 2982 0191,
Email: sekretariat@ifsa.or.id

rapindo

RAPINDO
USER CONFERENCE 2023
AWARE
Anticipate with Asset Registry



Thursday, July 27 2023 | Epicentrum XXI



https://s.id/fotoalbumAWARE23



BCA finance
solusi tepat pembiayaan anda

DP Ringan

5%

Mobil Baru



Khusus untuk Mobil Penumpang

BCA Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Astari 08111027780 mybcaf www.bcafinance.co.id